

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Perjalanan otonomi daerah di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan baru dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah. Dalam kedua UU ini pemerintah dan DPR memberikan jawaban/solusi terhadap permasalahan yang terdapat dalam paket UU terdahulu yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. UU No.32 Tahun 2004 lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007), ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah,
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,

c) Penerimaan dan pengeluaran daerah,

d) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Satuan Perangkat Kerja (SKPD) daerah, dan

e) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dikelola dengan berdasarkan azas umum: tertib, taat pada peraturan undang-undang, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat buat masyarakat.

1. Tertib

Tertib merupakan keuangan daerah yang dikelola baik secara tepat baik dari segi waktu dan dengan penggunaan yang didukung dengan bukti dari segi administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Taat Peraturan

Taat pada peraturan adalah bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah harus selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Efektif

Efektif adalah penapaian hasilbaik dari segi program dengan dibarengi dengan sebuah target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dan hasil yang didapat.

4. Efisien

Efisien adalah sebuah pencapaian keluar yang bersifat maksimal dengan baik masukan atau penggunaan masukan tertentu dengan mencapai suatu keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Ekonomis yaitu pencapaian masukan tertentu dengan kualitas terbaik dengan harga terendah.

6. Transparan

Transparan adalah prinsip azas keterbukaan yang memungkinkan setiap elemen masyarakat mendapatkan hak informasi sebanyak-banyaknya tentang setiap pengelolaan keuangan daerah.

7. Bertanggung jawab

Merupakan sikap seseorang dalam hal melaksanakan tentang mempertanggung jawabkan pengaturan dan mengendalikan baik dalam hal sumber daya maupun lainnya dan setiap pelaksana harus sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



8. Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan dalam hal baik kewenangan dan pendistribusian hak dan kewajiban berdasarkan distribusi yang objektif dalam hal kewenangan.

9. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil dengan proporsional dan wajar.

10. Manfaat

Manfaat kepada masyarakat adalah setiap keuangan harus selalu di prioritaskan kepada masyarakat.

Akuntansi merupakan suatu kegiatan baik itu jasa fungsi menyediakan data kuantitatif, baik yang memiliki sifat keuangan suatu kegiatan ekonomi yang bisa digunakan dalam pengambilan setiap keputusan ekonomi ekonomi dalam rangka melaksanakan alternatif dari sebuah kegiatan dilaksanakan berbagai bidang-bidang dan terutama dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam akuntansi memiliki berbagai macam yaitu, akuntansi perusahaan (*Business Accounting*), Akuntansi pemerintah (*Governmental Accounting*), dan Akuntansi sosial (*Social Accounting*).

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001: 3). Sistem Akuntansi Pemerintah adalah Sistem terpadu



yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah.



Akuntansi Keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam kegiatan akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan baru pemerintahan Republik Indonesia yang mereformasi pengeluaran daerah semenjak itu. Reformasi tersebut di gunakan untuk menggantikan Undang – Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang – Undang No 22 tentang Pemerintahan Daerah . Undang – Undang No 22 tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya di laksanakan Otonomi Daerah sehingga Undang – Undang tersebut di sebut dengan Undang –Undang Otonomi Daerah. Menurut Undang –Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang di berikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam Akuntansi Pemerintahan data akuntansi di gunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba, melainkan melayani masyarakat dalam urusan dengan pemerintah.

Kas sebagai alat pembayaran yang likuid harus di kelola dengan baik untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan kas dapat di hindari dengan suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Kas dapat dengan mudah di pindah tangankan dan tidak dapat di buktikan kepemilikannya, sehingga kas sangat mudah di selewengkan. Dengan adanya suatu sistem informasi dan pengendalian intern yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan perusahaan dapat di hindari dan diminimalisasi.

Pada dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan provinsi sumatera barat kas yang didapat dari anggaran pemerintah provinsi atau dari penjualan aset daerah akan di terima oleh bendahara penerimaan yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja atau renja tahunan. Dari kegiatan yang di ajukan baru di buat anggaran yang di lanjutkan dengan pengeluaran dana yang di butuhkan oleh bendahara pengeluaran.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan,Hortikultura,dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu badan yang mempunyai

kegiatan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, Perkebunan dan pangan. Sehingga dalam kegiatannya Dinas pertanian tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan provinsi Sumatera barat melakukan prosedur akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas merupakan suatu informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan untuk pengambilan suatu keputusan – keputusan ekonomi agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Tidak terlepas dari itu pastilah dalam Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memiliki sistem dan prosedur terhadap apa saja yang dibelanjakan pada SKPD tersebut, maka penulis berminat untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan provinsi Sumatera barat”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis ini dapat menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan penulisan mengenai Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

bab II : KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan provinsi sumatera barat

bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menguraikan Gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Tanaman

Pangan,Hortikultura,dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas tanaman pangan,hortikultura,perkebunan provinsi sumatera barat

bab V : PENUTUP

Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mengembangkan kesimpulan dan saran

